# PERUBAHAN RENGANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

rahmat-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun

2019 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun

2019 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Perubahan Rencana Kerja

(Renja) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019.

Semarang,

September 2019

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

**KOTA SEMARANG** 

Dr. WIDOYONO, MPH

Pembina Utama Muda

NIP. 19630809 198901 1 001

i

# DAFTAR ISI

KATA PI	ENGA	NTAR	i
DAFTAR	S ISI		ii
BAB I	PEN	IDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud Dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	EVA	ALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Lalu (201	7)
		Dan Capaian Renstra	7
	2.2	Analisa Kinerja Pelayanan	10
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan	
		Umum Kota Semarang	11
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
	2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III	TUJ	UAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
	3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja	16
	3.3	Program Dan Kegiatan	17
BAB IV	PEN	IUTUP	18

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perubahan perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan RENSTRA OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja OPD disusun oleh masingmasing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses

penyusunan Perubahan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Perubahan Renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan RENJA OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dokumen RENSTRA dan Perubahan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kota Semarang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terangkum dalam APBD Kota Semarang.

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di daerah memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019 adalah merupakan perubahan rencana satu tahun anggaran yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan dinas. Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang.

Dalam Perubahan Renja dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, kendala, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan disertai indikator kinerja.

#### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2019 adalah :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2019 Nomor 7);
- 17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 63);
- 18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2019 Nomor 44);
- 19. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016 2021.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019.

## 1.3.2 Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan P-RENJA, hubungan P-RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

# BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

# 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib Pekerjaan Umum yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, disamping tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2018, melalui 11 (sebelas) program dan 87 (delapan puluh tujuh) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.558.550.402.014,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.687.704.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 541.862.698.014,-

Realisasi anggaran tahun 2018 belanja tidak langsung mencapai Rp.15.835.095.319,- atau 94,89% dan belanja langsung mencapai Rp. 511.867.655.904,- atau 94,46%.

Dalam pelaksanaan rencana kerja program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Wajib Pekerjaan Umum			
	OPD : Dinas Pekerjaan Umum			
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.820.799.500	10.513.624.691	82,00%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	252.920.000	241.515.000	95,49%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3.810.000.000	2.757.658.681	72,38%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.817.000.000	1.777.984.250	97,85%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	250.000.000	243.817.150	97,53%
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	250.000.000	145.672.316	58,27%

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.276.707.500	1.033.806.429	80,97%
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	0	0,00%
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	200.000.000	192.082.338	96,04%
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.146.672.000	793.089.687	69,16%
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	100.000.000	32.325.000	32,33%
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan  Dan Bahan Pembersih	20.000.000	19.749.150	98,75%
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	3.695.000.000	2.980.209.500	80,66%
В	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	13.735.548.000	12.765.065.191	92,93%
13	Pembangunan Gedung Kantor	6.965.228.000	6.534.732.500	93,82%
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.020.320.000	1.922.876.325	95,18%
15	Pengadaan Mebeluer	450.000.000	445.896.000	99,09%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.370.000.000	2.146.269.595	90,56%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1.060.000.000	1.047.372.147	98,81%
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	345.000.000	272.375.950	78,95%
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	25.000.000	16.400.000	65,60%
20	Pendataan Aset	200.000.000	115.543.300	57,77%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	300.000.000	263.599.374	87,87%
С	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	79.760.000	35.328.750	44,29%
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	15.000.000	5.946.700	39,64%
23	Penyusunan Lkpj Skpd	8.460.000	3.246.400	38,37%

24	Penyusunan Lakip	7.320.000	4.685.900	64,02%
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	2.900.200	58,00%
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.480.000	750.000	16,74%
27	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	141.250	5,65%
28	Penyusunan Renja Skpd	25.000.000	8.071.800	32,29%
29	Penyusunan Rka Dan Dpa	12.000.000	9.586.500	79,89%
D	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	18.259.858.000	17.722.781.600	97,06%
30	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.000.000.000	2.953.293.000	98,44%
31	Pengadaan Material Pemeliharaan Drainase Dan Sungai	15.259.858.000	14.769.488.600	96,79%
E	Program Pengendalian Banjir	21.713.052.000	20.229.190.919	93,17%
32	Peningkatan Pembangunan Pusat- Pusat Pengendali Banjir	158.052.000	111.368.000	70,46%
33	Pengadaan Pompa Pengendali Banjir	4.200.000.000	3.833.728.025	91,28%
34	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pusat	3.650.000.000		
	Pengendali Banjir	3.030.000.000	3.403.198.600	93,24%
35	Pengendali Banjir  UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat	2.150.000.000	3.403.198.600 2.124.933.220	93,24%
35 36				
	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat UPTD Pompa Banjir Wilayah	2.150.000.000	2.124.933.220	98,83%
36	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah	2.150.000.000 7.955.000.000	2.124.933.220 7.452.843.924	98,83% 93,69%
36	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur Program Pengembangan Wilayah	2.150.000.000 7.955.000.000 3.600.000.000	2.124.933.220 7.452.843.924 3.303.119.150	98,83% 93,69% 91,75%
36 37 <b>F</b>	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Pembebasan Lahan Dalam Rangka	2.150.000.000 7.955.000.000 3.600.000.000 81.952.515.860	2.124.933.220 7.452.843.924 3.303.119.150 72.143.381.883	98,83% 93,69% 91,75% <b>88,03%</b>
36 37 <b>F</b> 38	UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Ifrastruktur	2.150.000.000 7.955.000.000 3.600.000.000 <b>81.952.515.860</b> 79.922.319.860	2.124.933.220 7.452.843.924 3.303.119.150 72.143.381.883 71.745.734.698	98,83% 93,69% 91,75% <b>88,03%</b> 89,77%

41	Perbaikan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Sistem Wilayah Tengah	11.805.633.000	11.572.221.650	98,02%
42	Perbaikan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Sistem Wilayah Mangkang	1.589.779.000	1.407.664.000	88,54%
Н	Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA	11.969.609.704	11.427.697.704	95,47%
43	Pengadaan Alat Berat SDA Dan Drainase	11.969.609.704	11.427.697.704	95,47%
I	Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan	254.440.000	490.852.000	192,91%
44	Pengadaan Alat-Alat Berat	254.440.000	490.852.000	192,91%
J	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	308.838.941.950	298.435.904.723	96,63%
45	Pengembangan Inner Ring Road	34.669.426.950	33.428.404.000	96,42%
46	Pengembangan Middle Ring Roads	27.459.377.000	27.347.407.000	99,59%
47	Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)	24.407.532.000	24.023.731.000	98,43%
48	Pengembangan Wilayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur)	8.258.149.000	8.231.717.000	99,68%
49	Pengembangan Wilayah BWK III (Barat - Utara)	13.950.849.000	13.853.826.000	99,30%
50	Pengembangan Wilayah BWK IV (Genuk)	9.497.730.000	8.121.169.000	85,51%
51	Pengembangan Wilayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)	18.710.367.000	18.200.008.450	97,27%
52	Pengembangan Wilayah BWK VI (Tembalang)	11.666.894.000	11.440.443.000	98,06%
53	Pengembangan Wilayah BWK VII (Banyumanik)	8.579.671.000	7.792.954.000	90,83%
54	Pengembangan Wilayah BWK VIII (Gunungpati)	14.999.781.000	14.857.742.000	99,05%
55	Pengembangan Wilayah BWK IX (Mijen)	13.540.057.000	13.500.019.000	99,70%
56	Pengembangan Wilayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu)	9.857.125.000	9.476.718.100	96,14%
57	Pengembangan Dekorasi Kota	42.427.988.000	39.782.392.000	93,76%

58	Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	3.400.000.000	2.189.474.000	64,40%
59	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan	43.334.101.000	42.883.904.568	98,96%
60	Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan	23.295.000.000	22.521.431.605	96,68%
61	Pemeliharaan Wilayah BWK IV (Genuk)	784.894.000	784.564.000	99,96%
K	Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur	13.611.706.000	12.566.247.869	92,32%
62	Survey Dan Pengukuran	400.000.000	370.638.475	92,66%
63	Perancangan Teknik	353.000.000	325.094.150	92,09%
64	Perencanaan Program Jalan & Jembatan	1.499.603.000	1.403.840.000	93,61%
65	Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan	5.047.094.000	5.008.753.000	99,24%
66	Inspeksi Kondisi Jalan	200.000.000	186.960.000	93,48%
67	Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan	255.000.000	230.186.000	90,27%
68	Patok Ruang Milik Jalan	200.000.000	172.648.000	86,32%
69	Leger Jalan	199.240.000	186.755.000	93,73%
70	Survey Kondisi Jalan	196.104.000	192.851.000	98,34%
71	Data Base Status Jalan Dan Jembatan	196.428.000	180.304.900	91,79%
72	Perencanaan Program SDA dan Drainase	1.097.659.000	541.569.000	49,34%
73	Perancangan Teknik SDA dan Drainase	200.000.000	183.580.000	91,79%
74	DED Sumber Daya Air dan Drainase	2.037.362.000	2.012.182.750	98,76%
75	Sistem Management Pengelolaan Jalan dan Jembatan	1.730.216.000	1.570.885.594	90,79%
L	PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH	26.085.405.000	24.439.093.664	93,69%
76	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat	1.650.000.000	1.357.990.750	82,30%
77	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan	1.339.600.000	1.068.231.400	79,74%

78	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur	2.050.000.000	1.983.897.050	96,78%
79	UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara	1.450.000.000	1.390.184.863	95,87%
80	UPTD Penyiapan Pengadaan Lahan	1.005.951.000	548.564.000	54,53%
81	UPTD Wilayah Tengah I	2.500.000.000	2.330.536.400	93,22%
82	UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga	5.289.854.000	5.023.401.500	94,96%
83	UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	10.000.000.000	9.960.826.300	99,61%
84	UPTD Laboratorium dan Pengujian	800.000.000	775.461.401	96,93%
	Total Keseluruhan	541.862.698.014	511.867.655.904	94.46%

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Waktu perencanaan pekerjaan yang terlalu singkat sehingga berpengaruh pada tahapan kegiatan pekerjaan.
- Pihak ketiga sebagai pemenang lelang dalam melaksanakan pekerjaan tidak mampu mempertanggungjawabkan komitmen yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu hingga terjadi pemutusan kontrak.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain

- Kriteria lelang yang dipersempit dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga pada proses lelang dapat menghasilkan pemenang lelang yang lebih kompeten dan berkomitmen.
- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan serta sosialisasi lebih lanjut dengan warga.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum maka capaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2018 antara lain:

INDIKATOR KINERJA		7	Realisasi		
		Target	Realisasi	Satuan	tahun 2017
1.	Persentase kawasan banjir.	4,37	4,37	%	4,69
2.	Persentase kawasan rob.	8,30	8,30	%	8,30

3.	Persentase kawasan genangan lokal.	4,00	4,00	%	4,00
4	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	83,85	89,54	%	88,72
5	Persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis.	59,21	59,21	%	41,40

# 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut :

- 1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
- 2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir.
- 3. Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh dengan memperhatikan kondisi sanitasi, drainase, jalan kampung, pengelolaan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya.
- 4. Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih dan limbah dasar.
- 5. Saluran limbah rumah tangga / asseinering sebagai pendukung kebersihan lingkungan.
- 6. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi.
- 7. Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku bagi petani dan domestik.
- 8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dalam meningkatkan kebersihan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan, penegakan hukum tata ruang dan bangunan, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan belum memenuhi target atau amanat peraturan perundang-undangan
- 9. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus/membuat ijin mendirikan bangunan (IMB).

- 10. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
- 11. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai dengan standar pelayanan publik.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi Dinas Pekerjaan Umum bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi darurat ataupun yang bersifat kebijakan dari Pemerintah maupun pimpinan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

#### **BAB III**

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 2025;
- 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sesuai RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021, telah ditetapkan 6 (enam) program RPJMD Kota Semarang. Dari ketujuh program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu mewujudkan pembangunan kota yang tangguh produktif dan berkelanjutan

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

- 1. Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
- 2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang merupakan sasaran yang sangat mendukung dari kinerja pemerintah Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Dengan kinerja yang optimal diharapkan tercapai Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob yang dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang dari seluruh aspek dan berbagai pihak seperti Perangkat Daerah Lain, Masyarakat dan Stakeholder.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

## 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021, serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 maka disusunlah rencana program dan kegiatan tahun 2019 sebagai berikut:



# RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR R DPPA SKPD

2.2

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintah 1.1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Organisasi 1.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Rincian Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Bertambah Target Kode Uraian Lokasi Sumber Kineria Sebelum Sesudah (Berkurang) % Keg Kegiatan Dana (Kuantitatif) Perubahan Perubahan Prog Rp 2 3 4 5 6 8 9=8-7 10 1 01 **Program Pelayanan Administrasi** 13.411.817.000 13.930.757.000 518.940.000 3,73 Perkantoran 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pekerjaan Umum APBD Kota Surat Masuk dan Surat Keluar 20.000.000 20.000.000 2.87 APBD Kota 3.800.000.000 3.912.130.000 112.130.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Pembayaran rekening listrik, air, Dan Listrik telepon, koran & internet Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan Umum APBD Kota Jasa Kebersihan & keamanan (rumah 2.730.000.000 2.755.000.000 25.000.000 0,91 pompa, polder, gedung dinas, workshop, gudang) 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan Umum APBD Kota Penyediaan Alat Tulis Kantor 247.448.000 247.448.000 0 0 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan APBD Kota 200.000.000 180.000.000 (20.000.000)(11.1 Dinas Pekerjaan Umum Cetak & Penggadaan dokumen 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / APBD Kota alat listrik & elektronik (lampu 290.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 290.000.000 Penerangan Bangunan Kantor pijar-battre kering dll) // servis & reparasi panel kelistrikan // operasional genzet 0 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Pekerjaan Umum APBD Kota Makan & Minum Rapat Koordinasi 414.369.000 414.369.000 322.800.000 33,18 018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dinas Pekerjaan Umum APBD Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 650.000.000 972.800.000 Daerah rangka koordinasi Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam APBD Kota Perjalanan Dinas Dalam Daerah // 40.000.000 0 0 Dinas Pekerjaan Umum 40.000.000 Daerah Rapat Koordinasi - Survey Harga -Survey Lokasi Aduan Masyarakat APBD Kota 20.000.000 30.000.000 60,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Dinas Pekeriaan Umum tersedianya peralatan dan bahan 50.000.000 Pembersih pembersih

					Target	Jumla	ah	Bertambah	
Ko	de	Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Honor : TPHL - PA /KPA - Tim FHO -	5.000.000.000	5.049.010.000	49.010.000	0,97
					Pendamping Kegiatan - Tenaga				
					Pengelolaan Administrasi - Tenaga				
					Pengelola Laboratorium				
02		Program Peningkatan Sarana Dan				17.500.000.000	5.212.498.486	(12.287.501.514)	(235,
		Prasarana Aparatur							73)
	003	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pembangunan Gedung/Gudang/Work	12.750.000.000	56.530.000	(12.693.470.000)	(22.4
					Shop				54,40
									)
	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemenuhan perlengkapan gedung	425.000.000	425.000.000	0	0
					kantor				
	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	750.000.000	750.000.000	0	0
	022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan Gedung/Gudang/Rumah	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000	23,08
					Pompa/Workshop				
	024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Operasional Kendaraan Dinas	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
		Operasional							
	026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemenuhan pemeliharaan	25.000.000	50.968.486	25.968.486	50,95
		Kantor			perlengkapan kantor				
	028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan Peralatan Gedung	350.000.000	330.000.000	(20.000.000)	(6,06)
		Kantor			Kantor - elektronik, AC, Mesin Tik,				
	065	Pendataan Aset	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pendataan Aset - fisik & administratif	300.000.000	400.000.000	100.000.000	25,00
	083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pajak kendaraan roda dua, roda	400.000.000	400.000.000	0	0
		Kendaraan Dinas Operasional			empat dan alat berat				
06		Program Peningkatan Pengembangan				142.500.000	108.490.000	(34.010.000)	(31,3
		Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan							5)
		Keuangan							
	002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	dokumen monev kegiatan &	15.000.000	15.000.000	0	0
					keuangan				
	006	Penyusunan Lkpj Skpd	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	dokumen laporan	20.000.000	20.000.000	0	0
					pertanggungjawaban, capaian				
					indikator kinerja				
	010	Penyusunan Lakip	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	dokumen Laporan Akuntabilitas	20.000.000	20.000.000	0	0
			_		Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				

					Target	Juml	ah	Bertambah	
Ko	de	Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	dokumen realisasi anggaran &	5.000.000	5.000.000	0	0
					Catatan Atas Laporan Keuangan				
					(CALK)				
	022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Dokumen Laporan Keuangan	5.000.000	5.000.000	0	0
					Semesteran				
	023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran	2.500.000	2.500.000	0	0
		Anggaran							
	028	Penyusunan Renja Skpd	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	dokumen usulan renja-sinkronisasi	25.000.000	13.920.000	(11.080.000)	(79,6
					hasil musrenbang-rencana kerja				0)
	030	Penyusunan Rka Dan Dpa	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Dokumen Rencana Kerja Anggaran &	50.000.000	27.070.000	(22.930.000)	(84,7
					Dokumen Pelaksanaan Anggaran				1)
21		Program Pengembangan Dan Pengelolaan				23.007.705.000	22.036.934.500	(970.770.500)	(4,41
		Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan							)
		Pengairan Lainnya							
	010	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.007.705.000	3.007.705.000	0	0
	084	Pengadaan Material Pemeliharaan Drainase Dan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pengada nmaterial untuk	20.000.000.000	19.029.229.500	(970.770.500)	(5,10)
		Sungai			pemeliharaan drainase dan sungai,				
					Upah tenaga/tukang untuk				
					pemeliharaan drainase dan sungai ,				
24		Program Pengendalian Banjir				27.708.000.000	22.996.400.000	(4.711.600.000)	(20,4
									9)
	800	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Cakupan area kapasitas pompa banjir	3.000.000.000	410.420.000	(2.589.580.000)	(630,
		Pengendali Banjir			, Persentase pompa pengendali banjir				96)
					yang optimal				
	197	Pengadaan Pompa Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Terpenuhinya kapasitas dan jumlah	4.500.000.000	4.493.580.000	(6.420.000)	(0,14)
					pompa pengendali banjir untuk				
					penanganan banjir & rob				
	198	Rehabilitasi/pemeliharaan Pusat Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Terwujudnya sarana dan prasarana	2.020.000.000	1.670.000.000	(350.000.000)	(20,9
					sistem polder yang optimal dalam				6)
					penanganan banjir & rob				
	204	Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Operasional dan sistem drainase	2.500.000.000	2.450.000.000	(50.000.000)	(2,04)
					wilayah barat yang optimal				

					Target	Jum	lah	Bertambah	
Ko	ode	Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	205	Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah I	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan dan operasional sarana	4.000.000.000	3.134.400.000	(865.600.000)	(27,6
					dan prasarana sistem polder kali				2)
					banger				
	206	Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Tengah Ii	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Operasional dan pemeliharaan sistem	7.000.000.000	6.450.000.000	(550.000.000)	(8,53)
					polder kali semarang				
	207	Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Sistem dan sub sistem drainase	4.688.000.000	4.388.000.000	(300.000.000)	(6,84)
					wilayah timur yang optimal				
25		Program Pengembangan Wilayah Strategis				39.000.000.000	38.750.000.000	(250.000.000)	(0,65
		Dan Cepat Tumbuh							)
	026	Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Persentase luas lahan yang	39.000.000.000	38.750.000.000	(250.000.000)	(0,65)
		Infrastruktur			terbebaskan dalam rangka				
					pembangunan infrastruktur				
38		Program Pembangunan Dan Pemeliharaan				61.000.000.000	42.484.323.275	(18.515.676.725)	(43,5
		Sumber Daya Air							8)
	001	Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Terwujudnya perbaikan saluran	14.000.000.000	7.443.445.178	(6.556.554.822)	(88,0
		Wilayah Timur			drainase di wilayah timur				8)
	002	Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Terwujudnya perbaikan saluran	47.000.000.000	35.040.878.097	(11.959.121.903)	(34,1
		Wilayah Tengah			drainase di wilayah tengah				3)
39		Program Pengadaan Dan Peningkatan				5.500.000.000	901.680.000	(4.598.320.000)	(509,
		Sarana Dan Prasarana Sda							97)
	002	Pengadaan Alat Berat Sda Dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya alat berata penunjang	5.500.000.000	901.680.000	(4.598.320.000)	(509,
					pemeliharaan drainase				97)
41		Program Pembangunan Dan Pemeliharaan				192.274.546.000	160.384.491.539	(31.890.054.461)	(19,8
		Jalan Dan Jembatan							8)
	001	Pengembangan Inner Ring Road	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	perencanaan pemeliharaan	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	0
					jalan-jembatan-pedestrian,				
					Terwujudnya peningkatan jalan inner				
					ring road				
	002	Pengembangan Middle Ring Roads	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	0
					jalur middle ring road				
	003	Pengembangan Wilayah Bwk I (timur - Tengah -	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	11.000.000.000	8.919.176.730	(2.080.823.270)	(23,3
		Selatan)			wilayah BWK I (timur-tengah-selatan)				3)

					Target	Juml	ah	Bertambah	
Kode		Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	004	Pengembangan Wilayah Bwk Ii (candisari -	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	4.000.000.000	3.111.368.000	(888.632.000)	(28,5
		Gajahmungkur)			BWK II (candisari-gajahmungkur)				6)
	005	Pengembangan Wilayah Bwk Iii (barat - Utara)	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	15.000.000.000	19.399.023.000	4.399.023.000	22,68
					wilayah BWK III (barat-utara)				
	007	Pengembangan Wilayah Bwk V (gayamsari -	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	6.500.000.000	4.922.674.159	(1.577.325.841)	(32,0
		Pedurungan)			wilayah BWK V				4)
					(gayamsari-pedurungan)				
	800	Pengembangan Wilayah Bwk Vi (tembalang)	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	9.000.000.000	6.486.843.779	(2.513.156.221)	(38,7
					wilayah BWK VI (tembalang)				4)
	009	Pengembangan Wilayah Bwk Vii (banyumanik)	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	10.000.000.000	4.890.057.000	(5.109.943.000)	(104,
					wilayah BWK VII (banyumanik)				50)
	012	Pengembangan Wilayah Bwk Xi (ngaliyan - Tugu)	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya peningkatan jalan pada	7.500.000.000	5.683.876.951	(1.816.123.049)	(31,9
					wilayah BWK XI (ngaliyan-tugu)				5)
	013	Pengembangan Dekorasi Kota	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	tersediannya infrastruktur ruang milik	15.000.000.000	49.425.448	(14.950.574.552)	(30.2
					jalan dalam kondisi baik				48,74
									)
	014	Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	operasional pemeliharaan jalan &	4.000.000.000	3.650.000.000	(350.000.000)	(9,59)
		Jembatan			pedestrian				
	016	Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan &	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	pengadaan material pemeliharaan	83.274.546.000	84.842.046.472	1.567.500.472	1,85
		Jembatan			jalan, jembatan & pedestrian				
	017	Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	terwujudnya pemeliharaan ruang	20.000.000.000	18.430.000.000	(1.570.000.000)	(8,52)
					manfaat jalan				
42		Program Perencanaan Dan Pengembangan				11.762.000.000	11.006.748.200	(755.251.800)	(6,86
		Infrastruktur							)
	001	Survey Dan Pengukuran	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Persentase Hasil Data Ukur Survey	300.000.000	307.500.000	7.500.000	2,44
					dan Pengukursn yang Dicapai				
	002	Perancangan Teknik	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Terwujudnya Dokumen Perencanaan	350.000.000	350.000.000	0	0
					Peningkatan Infrastruktur				
	003	Perencanaan Program Jalan & Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1.000.000.000	1.100.000.000	100.000.000	9,09
	004	Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2.600.000.000	3.203.600.000	603.600.000	18,84
					Rehabilitasi / Pemeliharaan ,				
	007	Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Sertifikasi Infrastruktur kePuan	900.000.000	900.000.000	0	0
	800	Patok Ruang Milik Jalan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Data Aset kePUan	100.000.000	100.000.000	0	0

					Target	Juml	ah	Bertambah	
Kode		Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	012	Perencanaan Program Sda Dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Penyusunan Perencanaan Program	3.312.000.000	1.457.774.500	(1.854.225.500)	(127,
					SDA dan Drainase				20)
	013	Perancangan Teknik Sda Dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Tersedianya acuan pelaksanaan	200.000.000	200.000.000	0	0
					pekerjaan infratsruktur pengairan				
	015	Ded Sumber Daya Air Dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Tersedianya DED pekerjaan SDA dan	700.000.000	1.100.125.000	400.125.000	36,37
					Drainase				
	020	Leger Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Sertifikasi infrastruktur kePUan ,	200.000.000	200.000.000	0	0
	021	Database Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Up Datting data infrastruktur	1.100.000.000	1.087.748.700	(12.251.300)	(1,13)
	026	Laboratorium Dan Pengujian	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Alat-alat laboratorium dan pengujian	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
					yang terpelihara				
43		Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah				34.900.000.000	30.118.000.000	(4.782.000.000)	(15,8
									8)
	010	Pengelolaan Peralatan Dan Perbengkelan	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Peningkatan pelayanan kebutuhan	23.500.000.000	18.368.000.000	(5.132.000.000)	(27,9
					kinerja Dinas				4)
	011	Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan Infrastruktur wilayah	2.000.000.000	1.950.000.000	(50.000.000)	(2,56)
					barat (kecamatan tugu, mijen,				
					semarang barat dan ngaliyan)				
	012	Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Wilayah Ii	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan infrastruktur wilayah	3.700.000.000	4.100.000.000	400.000.000	9,76
					utara (kecamatan semarang utara,				
					semarang tengah, semarang selatan				
					dan gajahmungkur)				

					Target	Jumlah		Bertambah	
Kode		Uraian	Lokasi	Sumber	Kinerja	Sebelum	Sesudah	(Berkurang)	
Prog	Keg		Kegiatan	Dana	(Kuantitatif)	Perubahan	Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-7	10
	013	Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Wilayah Iii	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan infrastruktur wilayah	3.700.000.000	3.650.000.000	(50.000.000)	(1,37)
					timur (kecamatan semarang timur,				
					genuk, pedurungan dan gayamsari)				
	014	Pemeliharaan Jalan Dan Drainase Wilayah Iv	Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kota	Pemeliharaan infrastruktur wilayah	2.000.000.000	2.050.000.000	50.000.000	2,44
					selatan (kecamatan gunungpati,				
					banyumanik, candisari dan				
					tembalang)				
	JUMLAH						347.930.323.000	(78.276.245.000)	(22,5
									0)

Semarang,

## Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

dr. WIDOYONO, MPH 196308091989011001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

**BAB IV** 

**PENUTUP** 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selama tahun 2019. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja tahun 2019 juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2019 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2019.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pada tahun 2019 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pekerjaan pelaksanaan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum di Kota Semarang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang di urusan wajib Pekerjaan Umum serta mampu menyajikan kinerja yang optimal.

Semarang, September 2019

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA SEMARANG

Dr. WIDOYONO, MPH

Pembina Utama Muda NIP. 19630809 198901 1 001